

**KESIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY 2015**

Jasa Suatma
Dosen tetap STIE Semarang

Abstrak

Percepatan pelaksanaan AEC(Asean Economic Community) dari tahun 2020 menjadi 2015, dengan tujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai Pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional, Kawasan yang Memiliki Daya Saing Tinggi, Kawasan Pemerataan Pengembangan Ekonomi dan sebagai Sarana menuju Perekonomian Global, diperlukan peta strategi yang jelas dan diperlukan peran DPR dalam membantu koordinasi antar menteri serta memantau jalannya strategi yang telah dijalankan.

Strategi yang dapat ditempuh adalah pertama dengan perbaikan infrastruktur dan policy. Kedua, pemberian insentif fiskal bagi industri nasional. Ketiga, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus untuk mengurangi beban ekonomi. Jika diperlukan maka DPR dapat membentuk Panja AEC. Dengan demikian diharapkan Indonesia menjadi lebih siap dalam menghadapi percepatan AEC ini.

Kata Kunci : Percepatan, AEC

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Konferensi Tingkat Tinggi IX ASEAN di Bali tahun 2003 lalu merupakan sejarah baru bagi solidaritas kawasan Asia Tenggara dengan tercapainya kesepakatan Bali Concord II, karena mengusung tiga pilar kerjasama yaitu:

1. ASEAN Economic Community (AEC)
2. ASEAN Security Community
3. ASEAN Socio-Cultural Community

Dalam pertemuan itu menghasilkan blue print AEC yang intinya bahwa ASEAN sebagai pusat perdagangan regional yang terintegrasi dan dapat disejajarkan dengan MASYARAKAT UNI EROPA. Dalam blue print tersebut terdapat empat prioritas dalam kerangka AEC yaitu:

1. Adanya arus barang dan jasa yang bebas (*free flow good services*)
2. Ekonomi regional yang kompetitif (*competitive economic region*)
3. Perkembangan ekuitas ekonomi (*equitable economic development*)
4. Integrasi memasuki ekonomi global (*full integration into global economy*)

Blue print menggambarkan sebuah KESIAPAN dan LANGKAH yang harus dicapai dan JADWAL PEMBENTUKAN AEC. Dalam blue print AEC disebutkan telah memberikan kesempatan negara-negara yang belum siap menghadapi perdagangan bebas ini. Setiap enam bulan antara anggota ASEAN akan melakukan pertemuan guna mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan akan membantu negara-negara yang belum siap seperti Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.

Dalam blue print ini setidaknya terdapat 12 sektor yang menjadi prioritas integrasi dalam AEC yaitu:

Produk industri, jasa penerbangan, otomotif, E-ASEAN, elektronika, perikanan, peralatan kesehatan, produk berbahan baku karet, tekstil dan garmen, pariwisata, produk berbahan baku kayu, dan jasa logistik.

Dengan adanya AEC, maka segala bentuk PAJAK dan TARIF dihilangkan berdasarkan prioritas sektor yang disetujui, sedangkan segala faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal diijinkan bergerak bebas melewati tapal batas sepuluh negara anggota melalui pasar bersama.

Fungsi PASAR BERSAMA adalah meningkatkan ekonomi melalui KONSOLIDASI KEBIJAKAN. Menurut catatan yang ada, bahwa sejak diterapkannya AEC Blueprint pada bulan November 2007, sekarang ini telah dicapai kemajuan yang signifikan. Sejak 1 Januari 2010, sebesar 99,5 % pajak import yang terdapat didalam daftar tariff inklusi ASEAN di bawah Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) ditetapkan sebesar 0 – 5 %. Ini merupakan hasil nyata yang berdampak tinggi untuk ASEAN. Ketika sepuluh Negara Anggota ASEAN bergabung seluruhnya dalam CEPT-AFTA ini, nilai perdagangan antar Negara ASEAN mencapai US \$ 458,1 juta pada tahun 2008, atau meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2000.

PERMASALAHAN

- Bagaimana kesiapan Indonesia dengan adanya percepatan pelaksanaan Asean Economic Community dari tahun 2020 menjadi 2015, yang menjadikan kawasan ASEAN sebagai Pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional, Kawasan yang

Memiliki Daya Saing Tinggi, Kawasan Pemerataan Pengembangan Ekonomi dan sebagai Sarana menuju Perekonomian Global.

PEMBAHASAN

Belum tercapainya recovery ekonomi nasional pada format yang kondusif dan lebih baik, sejak hantaman krisis ekonomi dan gejolak reformasi yang masih mewarnai perekonomian nasional, telah memberikan implikasi negatif pada iklim dunia usaha di Indonesia. Apalagi setiap perekonomian global mengalami *turbulensi* sebagaimana yang saat ini tengah terjadi pada perekonomian Amerika Serikat yang memicu terjadinya krisis ekonomi dunia (termasuk Indonesia) sebagaimana yang dialami pada tahun 1997 dan 2007 lalu, secara langsung memberikan pengaruh signifikan pada fundamental ekonomi Indonesia

Disaat bersamaan tuntutan dunia global yang begitu dinamis, semakin menurunkan DAYA SAING pelaku usaha nasional yang selama ini masih bergelut dengan kompleksitas permasalahan-permasalahan internal. Selain itu juga harus memikul beberapa permasalahan lainnya seperti :

1. Beratnya beban kenaikan BBM.
2. Ekonomi Biaya Tinggi yang bertambah semarak justru ketika otonomi daerah diterapkan.
3. Rencana kenaikan TDL.
4. Minimnya infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.
5. Sampai kepada lambannya implementasi kebijakan pemerintah yang memberikan keberpihakan bagi pelaku usaha nasional dalam upaya peningkatan daya saing dan profesionalisme, maupun kebijakan yang memberikan kemudahan bagi berkembangnya dunia usaha nasional.

Kita menganut keterbukaan ekonomi dan kerjasama pertukaran barang dan jasa untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi yang kita miliki untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi Negara Indonesia tidak menganut perdagangan bebas dalam arti keterbukaan tanpa kendali. Tidak ada satupun produk yang dapat

diperdagangkan lintas border secara bebas.

Untuk itu, berdasarkan fungsi pengawasan DPR maka DPR mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah. Melalui TUPOKSI DPR itulah maka DPR dapat berperan dalam mendorong seefektif mungkin AEC melalui pembuatan PETA STRATEGI Indonesia agar bisa mencapai hasil yang sudah ditargetkan. Jadi harus jelas, seperti apa targetnya, dan bukan sekedar hanya memantau. Termasuk akan mendiskusikan secara jelas masalah teknisnya.

Selain itu DPR akan membantu pemerintah menjalankan fungsi koordinasi dengan melibatkan 4 menteri terkait yakni :

1. Menteri Perdagangan (Mendag)
2. Menteri Perindustrian (Menperin)
3. Menteri Negara BUMN
4. Menteri Negara Koperasi dan UKM

Ditambah dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bank Indonesia serta dunia perbankan tanah air yang diharapkan secara keseluruhan dapat berperan dalam rangka mendorong kesiapan industri nasional dalam menghadapi AEC 2015. Bank Indonesia dapat lebih memainkan peran dalam menjaga stabilitas moneter dan tingkat inflasi, sementara dunia perbankan tanah air dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan lebih baik.

STRATEGI YANG DAPAT DITEMPUH :

1. Penguatan ekspor.
Mendorong pemerintah melakukan penguatan perwakilan Indonesia di luar negeri, promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, penanggulangan masalah ekspor, pengembangan *trading house*, dan peningkatan peran LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) dalam pembiayaan ekspor.
2. Mendorong pemberian insentif fiskal untuk perusahaan-perusahaan yang produknya 100% untuk pasar ekspor.
3. Sedangkan strategi yang ditempuh untuk menyelesaikan isu-isu domestik, antara lain mendorong pembenahan tata ruang dan pemanfaatan lahan, pembenahan

- infrastruktur dan energi, pemberian insentif, memperkuat FTZ (*Free Trade Zone*) dan membangun kawasan Ekonomi Khusus, perluasan akses pembiayaan, penyederhanaan peraturan, serta pengembangan industri prioritas dan kompetensi inti daerah.
4. Untuk pengamanan pasar domestik, DPR akan mendorong pemerintah melakukan pengawasan daerah perbatasan, kepatuhan peredaran barang di pasar dalam negeri, dan peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri.
 5. Mendorong tumbuhnya industri kreatif di tanah air. Meminta pemerintah dapat lebih berpihak pada pengusaha kecil menengah (UMKM) yang saat ini sudah mulai melakukan ekspor.
 6. DPR dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan mendampingi pemerintah dan industri nasional dalam menghadapi implementasi perdagangan bebas diantara negara-negara ASEAN (AEC).

Tugas Panja ini kedepan yakni antara lain melakukan pendampingan kepada pemerintah dalam melakukan proses perundingan dan negosiasi, memantau persiapan industri nasional dalam menghadapi AEC. Jadi selain kita pantau pemerintahnya, industri juga harus didorong agar semakin efektif efisien sehingga siap menghadapi AEC.

Panja ini bisa dibentuk untuk membantu pemerintah menjalankan fungsi koordinasi dengan melibatkan 4 menteri yang telah disebutkan di atas. Panja bisa kalau tim ahlinya mampu mendata potensi-potensi dari dalam negeri dan seberapa besar kemampuan produk dalam negeri menembus pasar luar negeri, karena hingga saat ini, pemerintah belum terkoordinasi dengan baik dalam proses negosiasi.

Dengan penerapan STRATEGI DI ATAS, diharapkan Indonesia tidak ragu-ragu atau takut untuk berunding dengan negara lain di bidang integrasi ekonomi. Beberapa bentuk kerjasama yang telah berlangsung maupun tengah dijajaki itu antara lain :

1. ASEAN-China Free Trade Agreement
2. ASEAN-Korea Free Trade Agreements
3. ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)
4. ASEAN-India Trade In Goods Agreement.

5. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), tengah dilakukan perbaikan lebih lanjut mengenai bab perdagangan, jasa dan investasi
6. ASEAN mencatat adanya inisiatif untuk memperluas integrasi regional dengan mempertimbangkan rekomendasi studi bersama, baik itu East Asia Free Trade Agreement (EAFTA) maupun Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA).

Dengan merujuk pada telah dimulainya ACFTA (ASEAN China Free Trade Agreement) pada 01 Januari 2010, menurut pengamat ekonomi Faisal Basri dalam diskusi Madu dan Racun (14/3/2010), Indonesia merupakan negara yang diuntungkan dari pemberlakuan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). Pasalnya, produk Indonesia yang bersaing dengan produk China jumlahnya masih sangat sedikit. "Sebagai catatan, produk-produk Indonesia jumlahnya sedikit dalam head to head dengan produk China. Dari prosentase, kita paling rendah 26%. Yang paling tinggi justru Malaysia dan Thailand, masing-masing 88% dan 91%. Jadi yang bilang ACFTA itu merugikan itu harus berpikir ulang," ucap Faisal.

Jika dilihat dari angka realisasi ekspor di masing-masing negara Asean serta China, Indonesia merupakan negara yang memiliki peluang untuk dapat meningkatkan eksportnya setelah diberlakukannya ACFTA. Agar para pelaku industri dalam negeri dapat bersaing dengan para pengusaha China, maka dapat disiasati dengan mencari produk-produk yang tidak mungkin disaingi oleh China. Sebagai contoh garmen berbasis katun, memang produk kita kalah tapi jika kain berbasis kreatif, batik, China tidak akan bisa mengalahkan kita.

PENUTUP

Percepatan pelaksanaan AEC dari tahun 2020 menjadi 2015 memerlukan peta strategi yang jelas dan diperlukan peran DPR dalam membantu koordinasi antar menteri serta memantau jalannya strategi yang telah dijalankan.

Strategi yang dapat ditempuh adalah pertama sehat dulu biasanya dengan perbaikan infrastruktur dan *policy*. Kedua kebugaran, industri nasional perlu vitamin dan ini bisa ditempuh melalui insentif fiskal. Ketiga kalau sudah sehat dan pemberian vitamin, industri nasional butuh suplemen contohnya dengan Kawasan Ekonomi Khusus untuk mengurangi beban ekonomi. Jika diperlukan maka DPR dapat membentuk Panja AEC.

Disinilah DPR RI berperan dalam mengantisipasi secara komprehensif melalui sinergi stakeholder baik pemerintah, dunia usaha, *center of excellent* dan komponen masyarakat sehingga pelaksanaan AEC pada 2015 dapat berjalan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Denis Hew, 2005, *Roadmap to an ASEAN Economic Community*, First Published, ISEAS Publications Institute of Southeast Asian Studies, Singapore
- Dilip K. Das, 2005, *Asian Economy and Finance : a post-crisis perspective*, Springer Science+Business Media Inc, USA
- Hadi Soesastro, 2003, *An ASEAN Economic Community and ASEAN+3: How do they fit together*, Australia-Japan Research Centre, Sidney
- Michael G. Plummer and Siow Yue Chia, 2009, *Realizing the ASEAN Economic Community: a comprehensive assessment*, First Published, ISEAS Publications Institute of Southeast Asian Studies, Singapore